

ABSTRAK

Pelaksanaan pemerintahan yang berasaskan *good governance* bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan pasar yang dilaksanakan dengan sistem *open tender* dalam pengadaan barang dan/atau jasa seperti yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun juga oleh swasta, namun peraturan yang diacu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1320 dan berasaskan kebebasan berkontrak. Dalam kedua jenis pengadaan barang dan jasa tersebut dimungkinkan adanya subkontraktor. Subkontraktor pada pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki aturan yang lebih ketat daripada oleh swasta yang memiliki kebebasan atas bagaimana kontrak yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, adakalanya subkontraktor ini wanprestasi dan kemudian diajukan permohonan pailit oleh pihak lawannya. Tentunya akan berbeda siapa yang memiliki *legal standing* dalam pengajuan permohonan pailit tersebut dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dan oleh swasta.

Kata Kunci: *Good governance, open tender, subkontraktor, wanprestasi, pailit*

ABSTRACT

The implementation of the government based on good governance that aims to give the best service for the community. For the example is the construction of the market building that held by an open tender system that regulated in article 35 Presidential Regulation Number 54 of 2010 about government procurement of goods and services. This procurement not only held by the government but private too, but its referenced the Burgerlijk Wetboek article 1320 that based on freedom of contract. In both of the procurement it might be an existence of a subcontractor. The subcontractor in government procurement have more strict regulation than the private have. In the implementation, sometimes the subcontractor broken their promises (wanprestasi) an then filed for bankruptcy petition by the other side. It will be different who has the legal standing in between.

Keywords : *Good governance, open tender, subcontractor, wanprestasi, bankruptcy*